

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM PENATAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR  
(Studi Kasus: Kawasan Kuliner Kanrerong Karebosi)**

**NAURAH KAMILAH ASBACHRI  
E011191026**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

## **ABSTRAK**

**Naurah Kamilah Asbachri (E011191026) dengan judul skripsi yaitu “Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar” + 76 Halaman + 3 Gambar + Lampiran + Dibimbing Oleh Prof. Dr. Badu Ahmad, Ma.Si dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si**

Efektivitas Program merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan sebuah program. Efektivitas diukur untuk mengetahui seberapa besar suatu program berhasil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar”. Adapun, metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif, dan metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar ini, secara konsep sudah cukup baik, namun pada pelaksanaannya masih kurang efektif berjalan atau belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, ada empat indikator dari budiani untuk mengukur efektivitasnya; yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pedagang Kaki Lima, Program**



**HASANUDDIN UNIVERSITY**  
**FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE**  
**DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE**  
**PROGRAM STUDIES OF PUBLIC ADMINISTRATION**

## **ABSTRACT**

**Naurah Kamilah Asbachri (E011191026) with the thesis title "Effective Management of the Street Vendor Management Program in Makassar City" + 76 Pages + 3 Pictures + Attachments + Supervised by Prof. Dr. Badu Ahmad, Ma.Si and Adnan Nasution, S.Sos, M.Si**

Program effectiveness is one of the important things that must be done in implementing a program. Effectiveness is measured to determine how successful a program is in achieving its stated goals. This study aims to find out how the "Effectiveness of the Management of the Street Vendor Management Program in Makassar City". While the research method used is descriptive qualitative method, and the data collection method used is interviews and documentation.

The results of the study show that the Street Vendors Management Program in Makassar City is conceptually quite good, but in practice it is still ineffective or not in accordance with the objectives to be achieved. In this study there are four indicators from Budiani to measure its effectiveness; namely the accuracy of program targets, program socialization, program targets and program monitoring.

**Keywords : Effectiveness, Street Vendors, Program**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Naurah Kamilah Asbachri

NIM : E011191026

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus: Kawasan Kuliner Kanrerong Karebosi)"** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,



NAURAH KAMILAH ASBACHRI



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Naurah Kamilah Asbachri  
NIM : E011191026  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki  
Lima di Kota Makassar (Studi Kasus: Kawasan Kuliner Kanrerong  
Karebosi)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I,

Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si  
NIP 19621231 198903 1 028

Pembimbing II,

Adnan Nasution, S.Sos. M.Si  
NIP 197407 200501 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi



Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP 19831015 198903 1 006



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Naurah Kamilah Asbachri  
NIM : E011191026  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki  
Lima di Kota Makassar (Studi Kasus: Kawasan Kuliner Kanrerong  
Karebosi)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II, dan Tim Penguji Skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar. 12 Juli 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si

Sekretaris : Adnan Nasution, S.Sos, M.Si

Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA

: 2. Irma Ariyanti Arif, S.Sos, M.Si

( )  
( )  
( )  
( )

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ....*

*Alhamdulillah Rabbil'alamin...* segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 prodi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam, tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassalam*, yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak kendala serta hambatan, tetapi berkat Rahmat dari Allah Swt dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga kendala maupun hambatan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang teramat dalam kepada Orang tua tercinta, Ayahanda **Muhammad Nur Asbachri Leo** dan Ibunda **Sitti Hafsah**, atas segala cinta kasih, doa dan segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, serta bantuan baik materil maupun non materil. Tak lupa juga terimakasih penulis ucapkan kepada saudara **Nabilah Nurul Hikmah Asbachri** dan

**Nisriinaa Maharani Asbachri**, yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis, sehingga bisa melewati penyusunan skripsi ini dengan baik. Serta doa dan dukungan seluruh keluarga yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir.

Pembuatan skripsi ini juga tak luput dari bantuan berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, teruntuk kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh staf;
2. **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan seluruh staf;
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah., S.Sos., MAP** selaku Ssekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
5. **Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si** selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan banyak bantuan, nasehat, arahan, serta bimbingan kepada penulis sejak awal studi hingga akhir masa perkuliahan.
6. **Adnan Nasution, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing II, yang telah memberikan penulis nasehat serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.



7. **Dr. Muhammad Yunus, MA** dan **Irma Ariyanti Arif, S.Sos, M.Si** selaku dosen penguji pada ujian skripsi ini. Terimakasih atas segala kritik, saran dan masukan yang sangat membantu untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar.
8. Terimakasih juga diucapkan kepada **Seluruh Dosen serta Staf Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**, atas segala dukungan dan Ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama perkuliahan.
9. **Seluruh Staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, dan Seluruh Kecamatan dan Kelurahan**, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi maupun data, selama proses penelitian.
10. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis anak-anak **RUMAH** (Yuyu, Uta, Dira, Ima, Besse, Resti, Syl, Ayu, Lisa, Vhia, Tasya) yang telah memberikan dukungan, doa, nasihat dari maba hingga sekarang. Terimakasih atas moment-moment menyenangkan maupun menyedihkan, semoga sampai akhir.
11. Terimakasih untuk para bestie yang telah membersamai penulis, memberikan bantuan dan arahnya, Much Faisal Saputra, Saiful Islam, Kezia Nadyariswari, Wildan Nurul Huda, Annisya Variza Rivai, Nur Wahida, Fatur Rachman J dan Naylawaty Bachtiar.

12. **M I R A C L E 19** terimakasih banyak atas segala dukungan yang telah diberikan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terimakasih telah menjadi teman yang baik selama perkuliahan penulis.
13. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar **Humanis Fisip Unhas**, atas pengalaman, pembelajaran, kebersamaan serta cerita yang telah dilalui Bersama hingga kini.
14. Terimakasih kepada teman-teman **Presidium** tercinta (Resti, Amar, Nayla, Azwar, Toriq, Jeknuar) atas pembelajarannya, pengalaman barunya, seluruh arahan dan bantuannya, cerita dan air matanya selama periode kepengurusan. Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan juga canda tawanya.
15. **DMB Ceria** (Tika, Revi, Cakima, Riswal, Ismi, Fahmi, Ifah, Rifdah) terimakasih atas segala pengalaman dan ceritanya yang telah dilalui Bersama selama 1 periode.
16. Terimakasih juga diucapkan kepada teman-teman **KKN gelombang 108 Kopi Kahayya** atas kerjasamanya selama kurang lebih 2 bulan, dan terkhusus kepada **anasombapunyakenangan**. Terimakasih atas Kerjasama, suka dan dukanya, momen-momen yang tidak terlupakan, pelajaran, serta ceritanya selama berada di tempat KKN.
17. Terimakasih juga untuk kakanda Andifulu, Bang Callu, dan Isty Anggraeni, yang telah menemani penulis, serta memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

18. Terimakasih untuk 23 bujang NCT, terkhusus NCT DREAM yang selama proses penyusunan tugas ini, selalu menemani penulis melalui lagu-lagunya dan kelucuannya, yang membantu mengurangi beban dengan suara dan kata indahny. To the world yeogin NCT.

19. Terakhir dan special, *Thanks to myself, for not giving up, for sticking around till now, and for believing me.*

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala bantuan, doa, semangat, motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih serta meminta maaf apabila ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan kita semua Aaamiinn. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

***Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh....***

Makassar, 12 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
II.1 Konsep Administrasi Publik .....	9
II.1.1 Pengertian Administrasi Publik .....	9
II.2 Konsep Efektivitas .....	13
II.2.1 Pengertian Efektivitas .....	13
II.2.2 Pengukuran Efektivitas .....	15
II.2.3 Indikator Efektivitas.....	16
II.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	18
II.2.5 Pendekatan Efektivitas .....	18
II.3 Konsep Program .....	20
II.3.1 Definisi Program .....	20
II.3.2 Efektivitas Program.....	22
II.4 Konsep Pengelolaan .....	23
II.4.1 Definisi Pengelolaan.....	23
II.5 Konsep Pedagang Kaki Lima .....	25
II.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	25
II.6 Konsep Program Kanrerong Karebosi.....	26
II.7 Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
III.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31

<b>III.2 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>III.3 Fokus Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>III.4 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>32</b>
<b>III.5 Sumber Data .....</b>	<b>33</b>
<b>III.6 Informan Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>III.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
<b>IV.1. Profil Lokasi penelitian.....</b>	<b>36</b>
<b>IV.1.1. Gambaran Umum Kota Makassar.....</b>	<b>36</b>
<b>IV.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.....</b>	<b>38</b>
<b>IV.3 Profil Kanrerong Karebosi.....</b>	<b>40</b>
<b>IV.4. Hasil Penelitian Efektivitas Program Penataan Pedagang Kaki Lima .....</b>	<b>43</b>
<b>IV.4.1. Ketetapan Sasaran Program .....</b>	<b>45</b>
<b>IV.4.2 Sosialisasi Program.....</b>	<b>51</b>
<b>IV.4.3 Tujuan Program .....</b>	<b>56</b>
<b>IV.4.4 Pemantauan Program .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
<b>V.1 Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>V.2 Saran .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....</b>	<b>30</b>
<b>Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 4.2 Strukur Organisasi UPTD Kanrerong .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 4.3 Kawasan Kuliner Kanrerong Karebosi .....</b>	<b>43</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Efektivitas menjadi tolak ukur yang penting untuk memantau sejauh mana suatu organisasi/perusahaan mampu untuk mencapai goals-nya. Efektivitas juga merupakan pencapaian dari suatu kegiatan atau program yang sebelumnya telah direncanakan. (Fadila et al., 2020) mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Dalam lingkup organisasi pemerintahan, khususnya pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah dirumuskan perlu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan atau program berpengaruh dan berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penilaian dari efektivitas dari sebuah program.

Efektivitas umumnya juga dilihat dari tingkat pencapaian dari tujuan organisasi yang sebelumnya telah ditentukan. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut, tentunya ada beberapa program yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif ketika, output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengukuran efektivitas diperlukan untuk menilai, apakah program-program yang dibuat berjalan dengan baik atau perlu dilakukan perubahan untuk mengetahui perlu atau tidaknya program ini dilanjutkan.

Kehidupan masyarakat perkotaan umumnya terpusat pembangunan sektor formal, dan tidak jarang warga pedesaan merasa bahwa hidup di kota lebih menjanjikan dibandingkan hidup di desa. Oleh karena itu, banyak warga desa yang

melakukan perpindahan ke kota untuk mensejahterakan hidupnya. Hal ini dikarenakan fasilitas ataupun lapangan pekerjaan di pedesaan tidak sebanyak dan tidak bervariasi seperti di perkotaan. Namun, upaya dalam mensejahterakan hidup oleh masyarakat desa yang berpindah ke kota tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada sektor formal. Fenomena umum yang terjadi adalah warga desa yang bermukim di perkotaan mata pencahariannya terpusat pada sektor informal utamanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu program strategis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang berkenaan dengan fenomena tersebut ialah Penataan Pedagang Kaki Lima. Melihat data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, jumlah pedagang kaki lima sekitar 125 pelaku usaha dan masih sementara melakukan pendataan.

Sektor informal merupakan salah satu sektor ekonomi yang terdiri dari usaha-usaha yang berskala kecil, yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja serta kesempatan untuk memperoleh penghasilan bagi para pelakunya. Sektor informal juga merupakan bidang ekonomi yang tidak selalu membutuhkan Pendidikan tinggi ataupun keterampilan yang tinggi, serta surat izin maupun modal besar. Kebanyakan warga desa yang berpindah ke kota tidak menyiapkan diri dengan Pendidikan ataupun keterampilan yang baik untuk bisa bersaing dalam mencari pekerjaan yang cukup layak. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran dikarenakan syarat-syarat akademik yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri ke perusahaan-perusahaan besar tidak dapat dipenuhi. Sehingga alternatif satu-



satunya ialah mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang tidak membutuhkan persyaratan, seperti misalnya sebagai PKL.

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut sebagai PKL, merupakan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas untuk mendapatkan penghasilan yang sah. Dilakukan tidak menetap, dengan kemampuan terbatas, modal yang sedikit dan biasanya berlokasi di titik atau pusat konsumen, dan juga berada di bahu jalan atau trotoar serta tidak berizin. Aspek lain dari pedagang kaki lima adalah dapat membantu mengurangi pengangguran dan menyelamatkan tenaga kerja yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja pada sektor formal. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar N0. 10 tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah tingkat II Ujungpandang menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang dalam usahanya termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah dan dalam kegiatan usahanya menggunakan pelataran.

Kemunculan PKL ini umumnya menjadi masalah karena dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban kota, namun Pedagang kaki lima juga warga negara, dimana pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Melihat hal itu, harusnya keberadaan PKL ini dilindungi, karena seperti yang kita ketahui, bahwa PKL merupakan salah satu sektor informal yang berperan cukup penting dalam membantu mengurangi angka pengangguran. Namun, di sisi lain Pedagang kaki lima juga harus mentaati aturan, menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan serta keindahan dalam wilayah kota. Permasalahan PKL memerlukan

pendekatan kebijakan yang komprehensif dan sinergis oleh pemangku kepentingan terkait.

Membuat atau merumuskan satu kebijakan/rencana program, pemerintah tentunya melihat dan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan baru kemudian dirumuskan. Keberhasilan sebuah pembangunan kota sangat ditentukan oleh kemampuan aparat pemerintahan dalam menghasilkan sebuah program/kebijakan untuk dilaksanakan dan tentunya dukungan masyarakat sangat diperlukan serta kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang program agar dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Setelah membuat dan melaksanakan program tersebut, Pemerintah Kota selaku pembuat kebijakan tentu juga harus mengawasi jalannya penerapan program ini, untuk mengetahui apakah program ini berjalan sesuai dengan rencana awalnya, dan apakah program ini efektif untuk dijalankan.

Sama halnya dengan penataan pedagang kaki lima ini, pemerintah tentu harus melihat terlebih dahulu permasalahan yang ada di lapangan, baru kemudian dirumuskan suatu kebijakan ataupun program untuk mengatasi masalah tersebut. Di Kota Makassar sendiri, penertiban PKL masih menjadi masalah yang harus diawasi oleh pemerintah selaku pembuat dan pengawas kebijakan. Sehubungan dengan perwujudan kebijakan publik, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui program Kanrerong Karebosi sebagai salah satu upaya Pemkot untuk mengelola dan memberdayakan PKL di kota Makassar.

Kanrerong Karebosi merupakan salah satu program prioritas Pemkot Makassar yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai pelaksana program, sebagaimana peraturan Walikota Makassar Nomor 98 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Program ini mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 dan walikota Makassar yang langsung meresmikan pada saat itu. Pedagang kaki lima kanrerong merupakan PKL yang bergerak dalam usaha kreatif dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Makassar secara selektif merelokasi para pedagang ke karebosi. Lokasi Kanrerong ini sendiri berada di sekitar lapangan karebosi yang menghadap langsung ke jalan kartini. Kios yang ada pada kanrerong ini berjumlah 265 lods yang diberikan secara gratis kepada pedagang kaki lima yang menempatnya. Pedagang kaki lima yang berada disini juga terus mendapat arahan dari SKPD terkait. Para PKL yang direlokasi ke karebosi merupakan pedagang kaki lima yang sering berjualan di sekitar masjid raya, jalan sunu dan juga sekitar lapangan karebosi.

Namun, dalam penerapannya, terdapat banyak kendala seperti pandemi covid-19 yang mengharuskan mereka untuk tidak berjualan malam, dan kurangnya pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Kawasan PKL kanrerong ini juga masih kurang dalam hal kebersihan dan keindahan, hal ini juga yang menjadi alasan kurangnya pengunjung yang datang. Pada awal tahun 2022 Pemerintah Kota Makassar merencanakan akan melakukan revitalisasi Kawasan kanrerong karebosi

yang nantinya akan digantikan dengan Smart Kanrerong, dimana para pedagang kaki lima yang sebelumnya di relokasi ke karebosi, akan di relokasi Kembali dan disebar di 13 kecamatan di Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar mengajukan tender untuk revitalisasi kawasan Kanrerong pada tahun 2023, namun gagal. Akan tetapi, pengosongan atau relokasi PKL sudah dijalankan sejak bulan agustus 2022. Adapun, dari 265 lods yang ada di Kanrerong Karebosi, tidak semua pedagang yang sebelumnya menempati lods tersebut ikut di relokasi. Hal ini dikarenakan, setengah dari jumlah pedagang melanggar aturan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada 15 Desember 2022, masih terdapat beberapa kios yang masih buka, namun jumlahnya sudah tidak banyak. Beberapa pedagang disana juga mengatakan bahwa sudah ada beberapa lods yang di relokasi ke kecamatan-kecamatan di Kota Makassar dan yang lainnya masih menunggu waktu untuk dipindahkan. Namun, yang menjadi masalah yaitu, belum adanya kejelasan tempat yang akan menjadi lokasi jualan baru para pedagang. Para pedagang kaki lima Kanrerong juga merasa tidak setuju dengan adanya relokasi ini, karena merasa bahwa tempat relokasi nantinya tidak seramai di karebosi. Hal ini dikarenakan relokasi PKL kanrerong ke kecamatan-kecamatan akan ditempatkan di Lorong-lorong nantinya.

Program penataan pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Makassar, oleh karena itu perlu untuk melihat efektivitas dari program ini, agar kedepannya Pemerintah selaku pembuat

kebijakan dapat mengetahui apakah program ini perlu untuk dilanjutkan, direvisi ataupun diganti dengan program lain yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang tertulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan atau referensi serta informasi bagi penelitian berikutnya. Juga menjadi bahan kajian khususnya pada ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan program.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kontribusi pemikiran kepada seluruh pihak terkait, khususnya Pemertintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Administrasi Publik**

##### **II.1.1 Pengertian Administrasi Publik**

Secara etimologi (Bahasa) kata administrasi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang memiliki arti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Siagian dalam (Malawat, 2022) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pasolong juga menjelaskan bahwa administrasi adalah suatu fenomena sosial dan hidup subur didalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Administrasi hingga saat ini dianggap sebagai artistic science, hal ini dikarenakan seni masih memiliki pengaruh dalam penerapannya. Science mengajarkan untuk mengetahui (*To know*), maka art berhubungan dengan kemampuan menerapkannya dalam memecahkan suatu masalah (*Problem solving*). Secara etimologi, kata publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat atau negara. Publik juga dapat diartikan sebagai khalayak umum, atau kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan berfikir, kesamaan harapan, kesamaan bertindak dalam berperilaku sesuai nilai-nilai norma yang dimiliki. Publik juga merupakan sekumpulan orang yang memiliki kepentingan masing-masing dalam hubungan antar manusia.

Administrasi publik diibaratkan sebagai tali penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Administrasi publik biasanya digunakan untuk memahami lebih dalam terkait hubungan tersebut dan dapat meningkatkan responsibilitas sebuah kebijakan publik demi keefektifan dan keefesienan pelaksanaannya. Ibrahim dalam (Malawat, 2022) juga mengatakan bahwa Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

### **II.1.2 Pendekatan Administrasi Publik**

Dari berbagai pendekatan, nantinya akan terlihat berbagai pusat perhatian, asumsi atau nilai dasar dan teori dasar yang sangat beragam serta menunjukkan adanya perubahan yang terjadi untuk membentuk teori baru yang lebih valid dan relevan. Menurut Presthus dalam (Malawat, 2022) pendekatan dalam administrasi public ada empat, yaitu

1. Pendekatan institusional (*the institutional approach*), Merupakan pendekatan yang menekankan pada kelembagaan dan organisasi ke- pemerintahan. Jantung utama pendekatan ini terletak pada studi mengenai struktur, fungsi, hukum dan regulasi dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
2. Pendekatan struktural (*the struktural approach*), Pendekatan struktural pada ilmu administrasi publik merupakan istilah yang diadaptasi dari ilmu sosiologi dan anthropologi yang menginterpretasikan sosial kemasyarakatan sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan.



3. Pendekatan perilaku (*the behavioral approach*), Pendekatan ini menekankan bahwasannya aktivitas administrasi tidak dapat terlepas dari studi mengenai behaviourism yang meneliti perilaku individu dan kesadaran perilaku kolektif manusia serta dampaknya dalam ruang lingkup administrasi publik

4. Pendekatan pasca-perilaku (*the post-behavioral approach*), Merupakan produk lanjutan daripada Pendekatan Perilaku a.k.a pendekatan yang muncul untuk menentang Pendekatan Perilaku yang 'cacat' dalam penerapannya. Walau lebih condong ke political science, pendekatan ini berkaitan erat dengan ilmu administrasi publik/negara utamanya dalam penerapan nilai-nilai administrasi yang dianut.

### **II.1.3 Unsur-Unsur Administrasi Publik**

The Liang Gie dalam (Malawat, 2022) membagi unsur-unsur Administrasi menjadi 8 Unsur, yaitu;

a. Organisasi, Pentingnya organisasi dalam administrasi publik ialah untuk mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan setiap orang serta membagikannya kepada pihak yang terkait, termasuk dalam menetapkan wewenang serta tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga bisa diartikan bahwa organisasi yang dimaksud adalah kerjasama suatu kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

b. Manajemen, berperan untuk menggerakkan orang-orang yang terkait dalam organisasi guna mengerjakan tugasnya masing-masing, hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Komunikasi, Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penyampaian berita dari satu orang ke pihak yang lain mengenai perkembangan kerjasama yang sedang dilakukan, dengan adanya komunikasi melalui suatu media yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan, maka akan timbul timbal balik serta pengertian di antara semua pihak yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

d. Kepegawaian, disebut juga sebagai rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dalam penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan suatu informasi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memelihara potensi yang ada dalam diri manusia guna tercapainya tujuan tertentu.

e. Perbekalan, dimaksud di sini ialah kegiatan yang menyangkut soal sarana dan prasarana yang ada, bisa berupa kerjasama antar anggota organisasi dalam memproses pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang dipakai hingga memilah-milah barang yang sekiranya tak terpakai.

f. Keuangan, Keuangan sangatlah penting guna mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, biaya yang dimaksud bisa berupa penataan maupun pengelolaan dalam perkantoran atau perusahaan.

g. Ketatausahaan, merupakan kegiatan dalam penyediaan layanan usaha kerjasama, baik itu berupa catatan keluar masuknya barang yang diperlukan, serta pengiriman dan penyimpanan fasilitas maupun informasi yang terkait.

h. Hubungan Masyarakat, yang dimaksud dalam administrasi publik ialah menjaga relasi yang terjalin antar pihak internal maupun eksternal, disebut juga sebagai

public relation dimana kegiatan usaha kerjasama yang sedang dijalani harus bisa menciptakan hubungan yang baik antar setiap pihak yang terkait, tujuannya agar penyampaian keputusan yang telah ditetapkan bisa diterima secara sukarela.

## **II.2 Konsep Efektivitas**

### **II.2.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Kata efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan seberapa baik tugas atau pekerjaan dilakukan, serta seperti apa hasil yang dikeluarkan yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Artinya, apabila sesuatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka tugas atau pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif.

Efektivitas juga merupakan salah satu nilai penting dari produktivitas (hasil), yang mengarah pada pencapaian maksimal, termasuk pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas merupakan sebuah kondisi, dimana untuk mencapai tujuan dengan hasil yang memuaskan, maka perlu melihat tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki sudah tepat. Efektivitas juga mengacu pada tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga kegiatannya dapat dikatakan efektif apabila dapat berpengaruh besar terhadap kemampuan dalam

menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang tentunya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya,

Penilaian efektivitas suatu program juga penting untuk dilakukan, untuk menemukan informasi terkait sejauh mana program ini berdampak dan bermanfaat kepada penerima atau yang menjadi sasaran program. Berdasarkan dari penilaian ini juga, pembuat kebijakan bisa menentukan dapat atau tidaknya suatu program untuk dilanjutkan. Efektivitas adalah seberapa baik suatu kegiatan dilakukan, apabila hasil yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang ditargetkan, maka semakin tinggi juga tingkat efektivitasnya. Siagian dalam (Bastaman et al., 2020) efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam jumlah sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Tangkilisan dalam (Fauzy Ahmat, 2019) mendefinisikan efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan cara-cara yang sesuai. Efektivitas juga merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## II.2.2 Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program atau kegiatan memberikan dampak dan manfaat yang tentunya sesuai dengan rencana program yang ditentukan. Pengukuran efektivitas program juga menjadi landasan untuk menentukan bisa atau tidaknya program tersebut untuk dilanjutkan.

(Budiani, 2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program : sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program : kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan program : sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantuan program : kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut sutrisno dalam (Pertwi & Nurcahyanto, 2017) untuk mengukur efektivitas program dalam sebuah organisasi ada 5 poin, yaitu:

- 1) Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
- 2) Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.

- 3) Tepat waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
- 5) Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

### **II.2.3 Indikator Efektivitas**

Ada 3 indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Menurut Tangkilisan dalam (Ratnasari, 2020)

#### a). Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan diartikan sebagai semua usaha yang dilakukan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu untuk mencapai suatu tujuan akan melewati beberapa tahapan proses.

#### b). Integrasi

Integrasi merupakan suatu pengukuran terhadap seberapa baik kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan atau kesepakatan bersama, antara anggota-anggota kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi sangat erat kaitanya dengan proses sosialisasi.

#### c). Adaptasi

Adaptasi merupakan pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi

merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah. Organisasi yang baik ialah organisasi yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan dilapangan.

Adapun Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam (Kawowode et al., 2018) menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

## **II.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Siagian dalam (Nurul & Lestari, 2019) mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas program, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sedangkan, Ripley dalam (Joyo, 2017), menyatakan faktor yang mempengaruhi kriteria efektivitas ialah sebagai berikut: (1). Akses, (2). Cakupan, (3). Frekuensi, (4). Bias, (5). Ketepatan Layanan, (6). Akuntabilitas, dan (7). Kesesuaian program dengan kebutuhan.

## **II.2.5 Pendekatan Efektivitas**

Hari Lubis dan Martani Huseini dalam jurnal *alvonkimbal* menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga



mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagianbagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *Official Goal*.

## **II.3 Konsep Program**

### **II.3.1 Definisi Program**

Kamus Bahasa Indonesia (KBI, 2008) , Program merupakan rancangan mengenai asas serta usaha di dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb yang akan dijalankan. Program adalah konsep prinsip dan kegiatan (dalam penyelenggaraan negara, perekonomian, dll) yang akan dilaksanakan. Program merupakan rangkaian instruksi dalam Bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis. Program adalah sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan program itu. Program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk lainnya dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan.

Secara konseptual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (16), program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh badan/organisasi utama yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai keinginan dan tujuan serta menerima alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi masyarakat. Menurut Mulyadi dalam (Sari, 2020) mengemukakan bahwa perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja yaitu berwujud berbagai macam bentuk kegiatan.

Menurut Charles O. Jones, dalam (Aditya et al., 2019) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu

yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Suatu program yang baik menurut bintoro tjokroamidjojo dalam (Pratama & Fauzi, 2018) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembagunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus di rumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat

### II.3.2 Efektivitas Program

Efektivitas Program merupakan suatu cara untuk mengetahui sejauh mana suatu program berjalan, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, serta mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Menurut Makmur dalam (Najidah Nurul & Dra. Hesti Lestari, 2019) efektivitas program dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, sebagai berikut:

1. **Ketepatan perhitungan biaya** berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
2. **Ketepatan berpikir**, Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal.
3. **Ketepatan tujuan**, Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
4. **Ketepatan sasaran**, Penentuan sasaran yang tepat baik, yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

## **II.4 Konsep Pengelolaan**

### **II.4.1 Definisi Pengelolaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengelolaan berasal dari kata Kelola yang berarti, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus ataupun menjalankan. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ataupun proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dengan kata lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan serta tujuan organisasi. Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada seluruh hal yang terkait pada pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. G.R Terry dalam jurnal (Rinta et al., 2022) mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pengelolaan juga bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai dengan hasil yang baik. Pengelolaan merupakan proses atau perbuatan yang memberikan pengawasan terhadap semua hal-hal yang terlibat dalam proses pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

### **II.4.2 Tujuan Pengelolaan**

Pengelolaan diharapkan dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sarana maupun prasarana untuk mencapai tujuan yang

ingin dicapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan sebuah program juga bertujuan untuk menjalankan rencana program sebagai usaha dalam mencapai visi dan misi dari sebuah organisasi. Hal ini dimaksudkan, untuk mengatur atau menjalankan, serta menggerakkan sumber daya yang ada. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, afifiddin dalam (Nadzifah, 2020) langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan
- 4) batasan waktu.
- 5) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 6) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 7) Menentukan ukuran untuk menilai
- 8) Mengadakan pertemuan
- 9) Pelaksanaan
- 10) Mengadakan penilaian
- 11) Mengadakan review secara berkala
- 12) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

#### **II.4.3 Fungsi Pengelolaan**

John D. Millet dalam (Nadzifah, 2020) menjelaskan bahwa fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Menurut

George R. Terry, dalam (Nadzifah, 2020) juga menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- a) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

## **II.5 Konsep Pedagang Kaki Lima**

### **II.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima merupakan orang-orang yang menjual barang dan jasa ditempat ramai atau pusat kota, yang biasanya menempati trotoar ataupun pinggir jalan. Pedagang kaki lima juga dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki tempat usaha yang permanen atau tetap. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia,

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan. Alma yang dikutip dalam jurnal (Rukmana, 2019) pedagang kaki lima ialah “Orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model *relative* kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.”

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1990, pedagang kaki lima adalah pedagang yang usahanya termasuk dalam golongan lemah dan dalam usahanya menggunakan pelataran. Sedangkan, dalam Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL, ialah orang-orang yang memiliki usaha atau menjual barang dan jasa tanpa modal yang besar, skill atau kemampuan yang mumpuni dan berjualan di pinggir jalan atau trotoar, serta biasanya berada pada pusat konsumen kota. Pedagang kaki lima juga sering diartikan sebagai distribusi barang jasa yang belum memiliki izin usaha yang resmi dan tempatnya berpindah-pindah.

## **II.6 Konsep Program Kanrerong Karebosi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota diberi kewenangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang



kaki lima. Berdasarkan peraturan ini, Pemerintah Kota Makassar membuat program untuk para pedagang kaki lima sebagai upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan dalam menumbuh kembangkan usaha kreatif di Kota Makassar.

Kanrerong adalah salah satu Program strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperbaiki tatanan Kota Makassar. Kanrerong sendiri berada di pusat Kota Makassar, tepatnya berada di sepanjang jalan Kartini, Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, sebelah lapangan karebosi. Kawasan kanrerong dikhususkan kepada pedagang kaki lima yang berjualan kuliner. Kawasan kanrerong memang ditargetkan sebagai pusat kuliner tradisional Kota Makassar yang juga diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di Indonesia.

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha pemerintah Kota untuk menumbuhkan usaha kreatif pedagang kaki lima serta membantu memajukan sektor pariwisata di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menyeleksi dan merelokasi para pedagang kaki lima yang kemudian dikumpulkan dalam satu Kawasan kuliner Kanrerong di dekat lapangan karebosi. Dinas Koperasi dan UKM merupakan SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan program ini.

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima Kanrerong Karebosi bahwa:

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Lorong Selanjutnya disebut UPTD-PLUL adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknik penunjang tertentu.

- Pedagang Kaki Lima Kanrerong adalah pedagang kaki lima yang melakukan usaha kreatif dengan menggunakan sarana usaha tidak bergerak, menggunakan hanya prasarana kota, fasilitas umum di atas lahan dan bangunan milik pemerintah kota.
- Penataan pedagang Kaki Lima Kanrerong adalah upaya kreatif yang dilakukan Pemerintah Kota melalui penetapan lokasi, pemindahan, penertiban dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kanrerong adalah upaya pemerintah kota dalam menumbuhkan usaha kreatif PKL Kanrerong dalam mendukung sektor usaha pariwisata kota.
- Lokasi PKL Kanrerong adalah tempat menjalankan usaha kreatif yang berada di area Karebosi bagian selatan kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang yang dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota.
- Menetapkan Karebosi bagian selatan yang menghadap sepanjang Jalan Kartini Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima yang resmi dan diberi nama Pedagang Kaki Lima Kanrerong.
- Pemerintah Kota merelokasi pedagang kaki lima secara selektif dan terbatas ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Operasionalisasi pedagang kaki lima Kanrerong secara fungsional dilaksanakan oleh UPTD yang dibentuk dengan peraturan sendiri.
- Pedagang kaki lima Kanrerong meliputi :

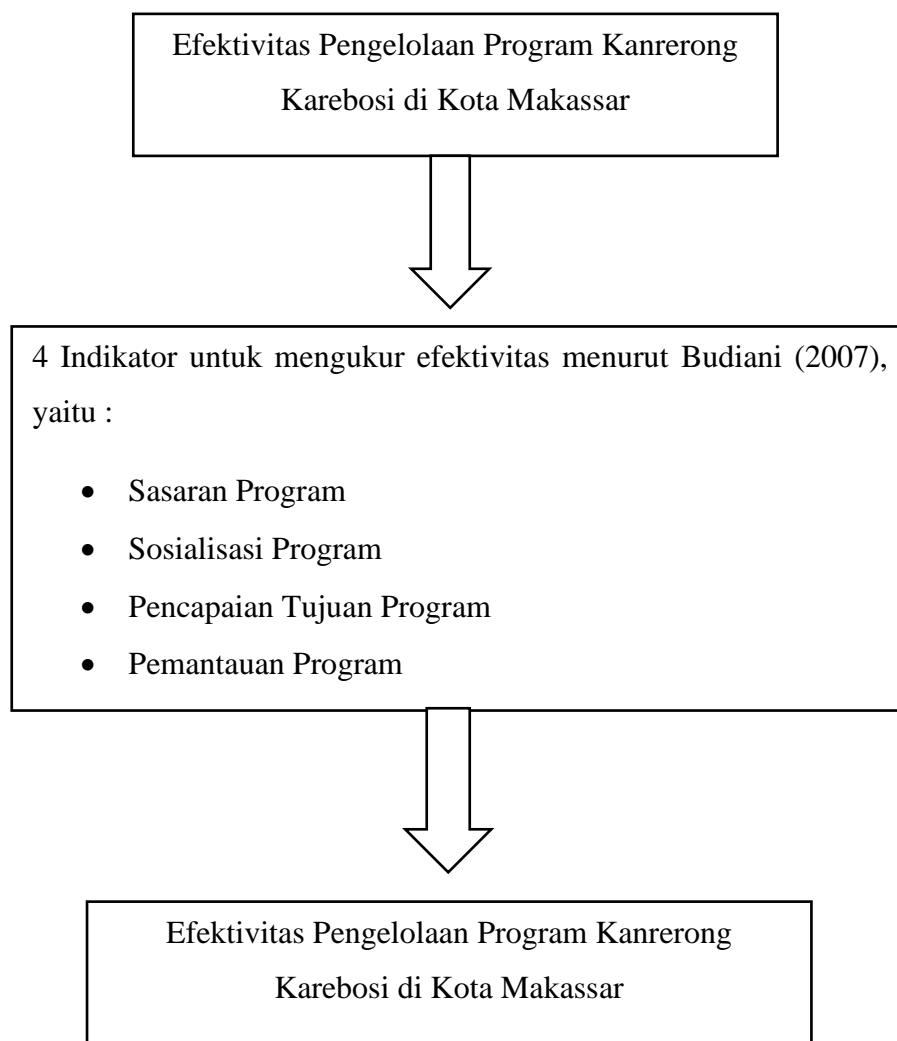
- a. Pendataan
- b. Pendaftaran, dan
- c. Penetapan tempat dan jenis usaha
- Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kanrerong meliputi:
  - a. Peningkatan kemampuan berusaha
  - b. Fasilitas akses permodalan
  - c. Fasilitas bantuan sarana
  - d. Penguatan kelembagaan
  - e. Fasilitas peningkatan produksi
  - f. Pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi usaha, dan 45
  - g. Pembinaan dan bimbingan teknis.
- Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kanrerong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD berperan serta berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **II.7 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus penelitian dalam upaya menjawab masalah- masalah yang ada dirumusan masalah penelitian tersebut. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pengelolaan program penataan pedagang kaki Lima di Kota Makassar. Oleh karena itu, untuk melihat keefektivan pengelolaan program penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar dapat dilihat dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh (Budiani, 2007). Pemilihan teori tersebut, dikarenakan indikator pengukuran

efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani diatas, relevan atau berkaitan dengan permasalahan yang ada. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- Sasaran Program
- Sosialisasi Program
- Pencapaian Tujuan Program
- Pemantauan Program



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**